



Judul : Jokowi tabur garam, awan demokrasi sedikit mendung
Tanggal : Sabtu, 04 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Jokowi Tabur Garam, Awan Demokrasi Sedikit Mendung

MANTAN Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjanto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat kiasan.

"Jokowi tengah menabur garam, agak mendung sedikit demokrasi kita," kata mantan Sekretaris Kabinet itu saat diwawancarai di kanal Youtube Akbar Faizal *Uncensored*, dikutip *Medcom.id*, kemarin.

Andi menduga taburan garam itu timbul dari pergeseran sikap Jokowi. Meski tak gamblang diperlihatkan, pergeseran Jokowi itu tampak dari sejumlah keputusan kontroversial. Andi mencontohkan keputusan MK mengabulkan uji materi UU Pemilu. Keputusan tersebut menjadi tiket Gibran Rakauming Raka, putra sulung Jokowi, maju sebagai bakal calon wakil presiden. Andi melihat keputusan tersebut mengusik awan demokrasi.

Fakta lain dari meredupnya awan demokrasi, lanjut Andi, ialah sikap para aktivis demokrasi tahun 1998. Mereka mulai bersuara lagi. Banyak pula yang mengkritisi. "Sekarang ini seperti ada reuni dari para aktivis 98 karena pergeseran Jokowi," kata Andi.

Andi berharap mendungnya demokrasi akibat pergeseran Jokowi tak lantas memburuk. Andi juga mengingatkan Jokowi untuk berhenti ketika mencoba berada dengan arus demokrasi.

"Jangan sampai hujan petir. Pastikan langit demokrasi cerah lagi," kata Andi yang juga Sekretaris Kabinet pada era Jokowi pertama kali memimpin.

Sikap Jokowi itu juga dikritik majalah *Time*. Mereka menilai demokrasi di Indonesia relatif baik atau pada puncaknya. Namun, dari kepemimpinan yang diperlihatkan Jokowi pada masa-masa terakhirnya, terdapat potensi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Majalah *Time* memperkirakan Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang mengantarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, Jokowi akan dicap sebagai bapak perusak demokrasi. "Seiring dengan berakhirnya satu dekade pemerintahan Jokowi, ia mungkin akan lebih dikenang karena mengantarkan era baru. (yakni) kemunduran demokrasi", tulis majalah *Time* di akun *Instagram*, Kamis (1/11).

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada UGM Zainal Arifin Mochtar menambahkan praktik pelanggaran politik dinasti (neofeodalistik) bisa terjadi disebabkan tidak adanya aturan yang memadai untuk membatasi kekuasaan presiden dalam proses pemilihan atau pemilu.

Menurut Zainal Arifin Mochtar, ancaman terbangunnya politik dinasti yang dibangun Joko Widodo harus segera diakhiri.

"Pemilu merupakan momentum untuk dijadikan sarana menghukum rezim yang tidak baik dan tidak serius. Pemilu adalah kudeta paling konstitusional untuk digunakan mengakhiri praktik demokrasi yang tidak benar dan mengakhiri politik dinasti." (Sru/P-1)